

Kepada Yang Mulia
Hakim Agung Mahkamah Konstitusi
di 
Jakarta

Perihal : Penyerahan Amicus Curiae terkait sengketa Pilpres 2024

Dengan hormat,

Bersama ini saya :

Nama : Ir. Ezrinal Azis MSc
Alamat : Perumahan Legenda Wisata Zona Vivaldi Blok M23/33
Kel. Wanaherang, Kec. Gunung Putri Kab. Bogor
NIK : 6474032106600006
Agama : Islam
Pekerjaan : Pensiunan PT Pupuk Kalimantan Timur

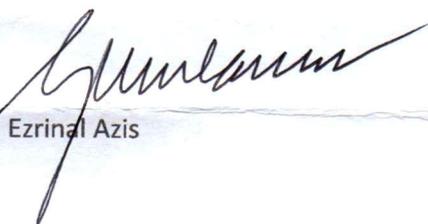
Atas nama pribadi menyampaikan Amicus Curiae (AC) terkait sengketa Pilpres 2024. Penyampaian AC ini adalah murni keinginan sendiri tanpa dorongan/dukungan/perintah dari pihak manapun dan merupakan bentuk partisipasi sebagai warga negara yang peduli terhadap keberlangsungan kehidupan demokrasi dalam berbangsa dan bernegara.

Semoga penyampaian AC memiliki makna dan berkontribusi pada keputusan yang adil dan dapat diterima semua pihak baik yang bersengketa maupun rakyat / masyarakat luas.

Demikian kami sampaikan atas perhatian Bapak Bapak Hakim yang mulia saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberi hidayah kepada Bapak Bapak semua. Amin

Jakarta, 19 April 2024

Hormat kami


Ezrinal Azis

AMICUS CURIAE

Oleh Ezrinal Azis

Istilah Amicus Curiae (AC) menjadi populer ketika Megawati mengajukan hal ini terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum yang tengah berproses di Mahkamah Konstitusi. Banyak orang (termasuk saya) belum banyak tahu ihwal istilah yang bermakna sahabat Pengadilan itu dan mencari pejelasan di google. Dari penjelasan di google diperoleh informasi bahwa AC adalah masukan dari pihak ketiga yang tidak berperkara baik individu maupun organisasi. Tujuannya adalah untuk membantu pemeriksaan dan sebagai bentuk partisipasi.

Sebagai rakyat biasa yang mengikuti proses pemilu dan tidak partisan serta menginginkan agar perselisihan pilpres bisa segera diselesaikan sehingga pemerintahan baru yang legitimate bisa segera diputuskan dan diterima oleh semua pihak, saya terpanggil untuk membuat tulisan yang dimaksudkan sebagai Amicus Curiae ini. Dalam hal ini saya sebagai rakyat biasa yang memiliki pendidikan yang cukup berusaha menjembatani kelompok elit dan rakyat awam menawarkan solusi penyelesaian perselisihan yang damai.

Sebelum pelaksanaan Pemilu di media massa marak pernyataan pernyataan yang dilontarkan oleh akademisi dan sosok sosok moralis seperti Gunawan Mohammad dan Romo Magnis yang menyuarakan terjadinya Nepotisme (terkait diloloskannya Gibran sebagai Cawapres dan terpilihnya Kaesang sebagai Ketua PSI). Sehari sebelum Pemilu muncul film 'Dirty Vote' yang menyuarakan indikasi kecurangan kecurangan Pemilu.

Namun suara suara diatas ternyata tidak berpengaruh pada hasil Pemilu dimana kubu 02 justru berhasil menang 1 putaran dengan perolehan hasil yang lebih tinggi dari hasil hasil survey sebelumnya. Halmana makin mendorong kecurigaan kubu 01 dan 03 akan adanya kecurangan Pemilu.

Pihak Penuntut (kubu 01 dan 03) menuntut agar MK mendiskualifikasi kubu 02 dan memerintahkan Pemilu ulang dengan alasan :

1. Penetapan Gibran sebagai Cawapres 02 cacat hukum dan diwarnai Nepotisme
2. Pelaksanaan Pemilu dipenuhi dengan kecurangan kecurangan dimana Presiden Jokowi memihak pada kubu 02. Kecurangan kecurangan tersebut dilakukan melalui : penyaluran Bansos yang bernuansa kampanye, pengerahan aparaturnegara, pemalsuan Sirekap dll sehingga dapat dikatakan kecurangan dilakukan secara Terstruktur, Sistematis dan Masif.

Hadirnya Amicus Curiae dari Megawati dan disusul oleh beberapa tokoh lainnya mendorong saya untuk ikut berpartisipasi guna mengimbangnya agar lebih adil dan menyuarakan hal hal yang dirasakan masyarakat bawah yang mungkin kurang tersalurkan.

Suara Elit Vs Silent Majority

Beberapa hari sebelum pencoblosan saya melakukan survey kecil kecilan pada masyarakat bawah seperti pembantu saya, penjual jamu, tukang ojek, pemulung dll. Hasilnya memang menguatkan hasil survey yang dilakukan oleh beberapa lembaga survey yang kredibel.



Mayoritas masyarakat bawah memilih Prabowo – Gibran dengan alasan antara lain :

1. Bersimpati pada Prabowo yang sudah 2 kali kalah
2. Mencintai Jokowi dan ingin agar program tidak berubah
3. Merasakan dan tidak suka pada kesombongan elit yang anti Jokowi

Saat berdialog dengan seorang penjual warung kecil yang berasal dari desa kecil di Semarang saya merasakan kecintaan rakyat pada Jokowi. Dengan berapi api si ibu menceritakan bahwa di desanya sudah bertahun tahun terabaikan, namun sejak Jokowi jadi Presiden pembangunan berupa jalan jalan di desa benar benar berjalan dan dirasakan manfaatnya. Pembantu saya membawa ibunya dari desa untuk operasi gondok di Jakarta, semua gratis katanya. Ini berkat program BPJS nya Jokowi. Juga pembantu saya yang lain cukup merasakan adanya bansos dari Pemerintah, meski mengkritisi karena kadang pendistribusiannya kurang tepat.

Ketika debat Presiden dimana Prabowo dilecehkan oleh Anies, pembantu saya berucap : "kok tega ya...". Saya juga bertanya pada anak saya mewakili generasi milenial dan generasi Z yang sudah ikut Pemilu tentang sosok Gibran, ternyata mereka ngefan dan suka pada Gibran yang bisa mewakili generasi mereka. Mereka kurang suka dengan narasi Butet yang menilai bahkan meremehkan sosok Gibran yang kurang berkualitas karena terlalu muda. Pendek kata suara elit itu bertolak belakang dengan suara mayoritas rakyat banyak atau yang disebut sebagai 'silent majority'.

Ketika Jokowi dihujat oleh berbagai kalangan (akademisi dan tokoh moralis), Jokowi tidak melakukan apapun untuk mengcounter hujatan tersebut. Jokowi hanya mengatakan bahwa negara kita adalah negara yang demokratis dan mempersilahkan siapapun untuk bersuara apapun terhadap Pemerintah. Ia justru memerintahkan untuk menghentikan proses hukum terhadap Butet (atas pelaporan beberapa pihak) yang terang terangan mengkritik Jokowi secara pedas. Sikap kenegarawanan ini bisa jadi ikut mendongkrak tingkat kepercayaan publik atas kepemimpinan Jokowi. Hal ini juga dibuktikan dengan hasil survey tingkat kepercayaan publik oleh beberapa lembaga survey. Fakta bahwa Jokowi dicintai rakyat bisa kita lihat aktivitas blusukan yang dilakukannya. Bahkan media Malaysia mengakui bahwa rakyat Malaysia lebih mengenal dan kagum pada sosok Jokowi daripada Perdana menterinya sendiri.

Legitimasi Gibran

Dari aspek Hukum terkait legitimasi Gibran tentu Majelis Hakim telah memperoleh banyak bukti dan fakta dari pemohon, termohon maupun pihak terkait. Saya hanya akan menguraikan fakta fakta dilapangan yang mungkin bisa jadi pertimbangan.

Di desa desa pada pemilihan Kepada Desa, apabila seorang kepala Desa berhasil dan dicintai rakyat, maka anak anaknya pun dicintai rakyat dan berhasil memenangkan pemilihan kepala Desa secara fair tanpa money politik. Isu politik Dinasti yang digaungkan beberapa kalangan elit terhadap Jokowi dan keluarga sepertinya tidak sejalan dengan pandangan masyarakat bawah/awam/silent majority. Awam tidak menganggap hal tersebut sebagai nepotis atau tabu. Anak saya yang baru mulai mencoblos menyatakan kesukaannya pada sosok Gibran yang milenial, demikian juga teman teman sebayanya. Mereka tidak merasa



terganggu dengan status Gibran yang anak Presiden. Apalagi mereka tahu bahwa kota Solo berkembang pesat dibawah kepemimpinan Gibran. Banyak hal yang berjalan di Solo karena kreativitas Gibran yang milenial yang mungkin sulit dicapai oleh generasi tua.

Saya tidak menampik bahwa ada problematik Hukum atas pencalonan Gibran sebagai Cawapres sebagaimana diungkap oleh Prof Yusril. Namun problematika Hukum itu sebaiknya tidak dibesar besarkan karena beberapa alasan. Pertama karena sudah ada penetapan secara Hukum oleh MK dan sudah ada pihak yang mendapat sanksi etik. Kedua tidak ada hal yang negatif secara prinsip atas penetapan batas umur Capres Cawapres dan bahkan hal ini bersesuaian dengan aturan aturan yang ada termasuk di Negara lain. Ketiga pembatalan Gibran justru akan melanggar prinsip Demokrasi atas hak seseorang. Keempat Gibran telah membuktikan kapabilitasnya antara lain saat debat Cawapres. Kelima Gibran diinginkan dan disayangi masyarakat Solo karena keberhasilannya membangun kota Solo dan dicintai kelompok milenial karena kemudahan dan kreativitasnya.

Isu Politik Dinasti dan Nepotisme

Pandangan bahwa telah terjadi politik dinasti oleh Jokowi sepertinya memang sulit dibantah. Selain Gibran yang akhirnya ditetapkan sebagai Cawapres, juga ada Bobby yang jadi walikota Medan, Kaesang yang jadi ketua Partai Solidaritas Indonesia. Dan isunya mantu Jokowi lainnya (Erina Gudono) akan ikut Pilkada Bupati di jateng. Akan tetapi apakah ini hal ini bisa dikategorikan sebagai Nepotisme dalam arti negatif mungkin perlu dibahas lebih lanjut.

Menurut saya istilah Nepotis baru bisa diterapkan apabila hal ini menyebabkan pelanggaran hukum seperti Korupsi atau memperkaya diri dan keluarga dengan kemudahan kemudahan seperti yang terjadi pada beberapa kepala daerah. Rasanya sampai saat ini isu korupsi di keluarga Jokowi tidak pernah muncul. Padahal di era yang super demokratis ini tidak ada yang takut untuk melaporkan atau menyuarakannya terutama oleh pihak pihak yang anti Jokowi.

Saya sendiri mempercayai isu bahwa Jokowi ingin mempertahankan kekuasaannya antara lain melalui Pilpres 3 periode atau perpanjangan masa jabatan yang sering diungkap antara lain oleh elit PDIP setelah Jokowi ternyata tidak mendukung calon dari PDIP. Apakah niat yang ada dibalik keinginan tersebut ? Hanya Jokowi dan Tuhan yang tahu. Namun yang ditudingkan selama ini adalah karena kenyamanan dan haus kekuasaan. Menurut saya itu adalah bagian dan su'udzon. Saya lebih cenderung untuk berkhushnuzon saja.

Jokowi berupaya memperpanjang kekuasaannya untuk memastikan agar program program positif yang telah dicanangkannya untuk rakyat itu tetap berada pada koridor yang benar. Saya juga yakin Jokowi khawatir atas rencangan besarnya terkait Ibu Kota Nusantara (IKN) itu akan berantakan apabila Presiden terpilihnya adalah kubu yang menghendaki perubahan. Tapi apakah itu salah ?

Isu Kecurangan Bansos

Fakta fakta tentang pengaruh bansos saat pemilu sudah cukup lengkap diungkap oleh Pemohon, termohon, pihak terkait dan juga dari pemanggilan dan keterangan para Menteri. Saya hanya ingin mengatakan bahwa memang benar Bansos menjadi faktor kemenangan

Prabowo Gibran. Namun itu bukan karena bansos yang dibagi bagikan Jokowi sebagai bentuk kampanye, akan tetapi justru karena program bansos yang berjalan selama 10 tahun Pemerintahan Jokowi. Dan itu sama sekali bukan kecurangan, melainkan program yang dirasakan manfaatnya oleh rakyat dan rakyat ingin agar program itu terus berlanjut. Rakyat alergi dengan isu perubahan yang bisa jadi diartikan tidak ada lagi bansos apabila Pemerintahan diganti oleh sosok yang merencanakan perubahan.

Kesimpulan dan saran

Atas dasar hal hal tersebut diatas saya (atas nama silent majority) berharap :

1. MK menolak permohonan Kubu 01 dan 03 untuk mendiskwalifikasi Paslon 02
2. MK mengakomodir isu isu yang dilontarkan Kubu 01 dan 03 dengan mengupayakan perbaikan sistem dan aturan untuk Pemilu mendatang yaitu :
 - a. Memperjelas aturan tentang Bansos saat Kampanye
 - b. Memperketat pengawasan atas money politics
 - c. Perbaikan sistem Sirekap

Cibubur, 18 April 2024

